

# PROFIL ORGANISASI

Nama	: YAYASAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( YPPM )
Alamat	: BTN Kebun Cengkeh Blok A5 No. 11 Ambon.
NPWP	: 1.878.903.2-941
No. Izin	: 220/203/Sospol / PEMDA Maluku 465.2 – 02 Thn.2001
SK MENKUM HAM	: AHU-2819.AH.01.04.Tahun 2010
E-mail	: <a href="mailto:yppm.maluku@gmail.com">yppm.maluku@gmail.com</a>
Website	: <a href="https://www.yppmmaluku.org/">https://www.yppmmaluku.org/</a>

## 1. Pendirian Lembaga dan Dimulainya Kegiatan.

---

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) hadir di Maluku karena kepeduliannya terhadap tragedi kemanusiaan yang melanda Maluku. Duka dibalik tragedi Maluku 1999 tersebut menjadi motivasi untuk mendirikan organisasi non profit yang diberi nama “Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Development and Outsourcing Community Funds) / YPPM.” Sekelompok orang yang mendirikan lembaga YPPM tersebut adalah para aktivis dari organisasi seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan LAKPESDAM NU.

Situasi dan kondisi disaat konflik Maluku 1999 telah memaksa masyarakat untuk hidup dalam komunitas yang berbeda dengan segregasi wilayah yang sangat jelas. Menyadari akan situasi sulit tersebut maka didirikan YPPM sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat, sehingga dapat menentukan langkah dalam melayani masyarakat secara kontinyu dan sistimatis menuju pada perubahan menadasar dalam masyarakat. Perubahan tersebut sangat ditekankan pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap konflik yang telah memisahkan antar komunitas sehingga menjadi utuh kembali serta menata kehidupannya kedepan dari pengalaman masa lalu.

Semangat melembaga tetap dirawat menyertai terciptanya perdamaian di Maluku. Setelah bibit perdamaian mulai tumbuh YPPM aktif mendorong proses rekonsiliasi dan demokrasi bagi masyarakat. Pengungsian akibat konflik berhasil dikembalikan ke tempat semula (daerah asalnya) kemudian hidup rukun tanpa mempersoalkan perbedaan etnis dan agama. Pemberdayaan dilakukan untuk masyarakat pada aspek ekonomi dan social serta advokasi. Program Lingkungan dilaksanakan untuk melindungi hak – hak masyarakat adat, mediasi dilakukan untuk membangun kesepahaman antara Pemerintah dan Masyarakat dalam membangun masyarakat madani, pengelolaan Hutan dan Pesisir serta sumber daya alam lainnya dalam tataran kehidupan masyarakat adat. Kegiatan – kegiatan tersebut masih didorong oleh YPPM sebab konflik antar etnis dan agama hari ini mungkin telah selesai tetapi potensi konflik dari Sumber Daya Alam masih sangat rentan yang harus menjadi perhatian serius.

## 2. Visi dan Misi YPPM

---

Sebagaimana ide awal mendirikan lembaga YPPM untuk menyatukan dan menata kembali tatanan kehidupan masyarakat Maluku yang hancur akibat konflik sebagai suatu tragedi kemanusiaan, berhimpun dalam satu wadah yang plural untuk melayani masyarakat yang pluralis maka visi dan misi organisasi adalah:

**Visi organisasi** :meumbuhkembangkan keberagaman dalam kebersamaan dan menjadi organisasi kemitraan yang terbuka, menjadikan masyarakat Indonesia yang beretika dan berbudaya demokrasi.

**Misi organisasi** :terciptanya kerjasama yang baik antara lembaga dalam menyahuti hak-hak masyarakat yang tertindas dengan tidak memandang etnis ataupun ras.

Dengan demikian maka YPPM merupakan lembaga independen dan terbuka untuk siapa saja yang mau beraktivitas sebagai pekerja kemanusiaan, dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang berpihak pada masyarakat sebagaimana visi dan misi lembaga YPPM. Dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan Pemerintah dalam upaya membangun masyarakat Maluku untuk Indonesia menuju masyarakat madani.

## 3. Kegiatan Utama YPPM.

---

Aktivitas utama yang dijalankan oleh lembaga YPPM meliputi:

➤ **Demokrasi & HAM;**

Bersama Masyarakat menjalankan Demokrasi, menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) serta peningkatan kapasitas tentang kesetaraan gender sehingga tatanan kehidupan yang plural dapat dirasakan kembali.

➤ **Pemberdayaan Masyarakat;**

Mendorong dan meningkatkan kapasitas individu serta kelompok – kelompok di dalam masyarakat untuk semakin berdaya pada kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan kelompok. Sehingga masyarakat lebih berpikir konstruktif dalam menciptakan situasi damai yang mendukung aktivitas masyarakat.

➤ **Lingkungan (Hutan dan Pesisir);**

Bersama stakeholder membangun kesepahaman untuk berupaya melakukan perlindungan terhadap hak–hak kepemilikan masyarakat adat dengan pendekatan adat dan budaya (kearifan) lokal.

## 4. Managemen

---

### Managemen

- Ketua : Abdugani Fabanjo  
Sekretaris : Sri Luluk Agustiningsih  
Bendahara : Hilda Hamida F.  
Anggota :
1. Ridwan Saleh Rumakat
  2. Noviyanti Sunardi
  3. Fahrul Zein Hurasan
  4. Arifin Daeng Roso

## 5. Pengalaman Kegiatan. (Daftar Terlampir)

---

Pengalaman YPPM dapat di lihat dari kegiatan pada beberapa waktu lalu yang telah dilaksanakan dengan sukses dan sedang dilaksanakan. Kesuksesan tersebut dapat menjadi pengalaman yang mendukung kemampuan pelaksanaan kegiatan selanjutnya dengan penjelasan diantaranya :

### b) Objek dan Lokasi Kegiatan.

Sebagai pengalaman untuk dapat menjelaskan kegiatan dan lokasinya maka berikut adalah kegiatan yang pernah dan sedang dijalankan seperti:

- Program Pendidikan Alternatif di Desa Tial Kecamatan Salahutu (Kerja sama YPPM-PKM/CRP, YPPM-DIKNAS). Program ini telah selesai dan sukses karena dapat menghimpun anak usia sekolah yang pada waktu konflik tidak dapat melakukan kegiatan sekolah di sekolah Induk sebab sekolah mereka berada pada wilayah komunitas lain (desa Suli). Para siswa tersebut termasuk didalamnya anak putus sekolah dari sekolah lain juga tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga mereka terhindar dari upaya profokatif untuk melibatkan diri atau menjadi korban dalam tindak kekerasan disebabkan konflik kemanusiaan di Maluku pada waktu itu.
- Program Pemberdayaan Orang Tua, Ibu – ibu, dan warga Jemaat Gereja Protestan Maluku di Kecamatan Salahutu dan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah (Kerja sama YPPM dengan PKM/CRP, ICMC, CordAid) serta pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir Salahutu dan Haruku (Kerja sama YPPM-CIDA). Program – programm tersebut telah selesai dilaksanakan serta mempunyai pengaruh positif dalam masyarakat terutama disaat konflik kemanusiaan yang melanda Maluku, program – program tersebut telah mampu menjembatani hubungan antar sesama masyarakat dalam upaya penciptaan kondisi yang kondusif menuju pada perdamaian yang sekarang telah dirasakan. Demikian pula dengan program Local Capacity Bulding (LCB) di Kecamatan Malifut Maluku Utara (Kerja sama YPPM-ICMC) telah selesai dan mampu memberikan semangat untuk masyarakat kembali ke tempat semula (daerah asal) untuk menjalani kehidupan mereka yang normal.

- Program Advokasi meliputi perlindungan hutan rakyat warga jemaat Gereja Protestan Maluku desa Tial dan Assesment serta pengembalian masyarakat pengungsi asal Seram Bagian Barat yang berasal dari desa Lokki, dusun Siaputy dan dusun Laala (kerja sama YPPM-ICMC didanai UNDP). Pengembalian hak – hak masyarakat adat di Petuanan Lilialy, Kajely dan Tagalisa kecamatan Buru Utara (kerja sama Yayasan KEMALA).
- Program Resolusi konflik dan Demokrasi seperti; Assesment dan dialog antar masyarakat adat di Salahutu dan PP.Lease (kerja sama YPPM-USAID), Pertemuan masyarakat adat di Salahutu untuk pemilihan / pengangkatan kepala Desa/Raja (kerja sama YPPM-DFID), dan Assesment pengembalian masyarakat pengungsi asal desa Poka dan Rumah Tiga (kerja sama YPPM-USAID) program ini telah mampu mendorong kemauan bersama antar masyarakat untuk mengembalikan masyarakat Kariu ke Pulau Haruku dan desa Waai ke kampung halaman di Kecamatan Salahutu Pulau Ambon. Serta menimbulkan semangat persaudaraan dari masyarakat Jazirah Leihitu untuk mengembalikan masyarakat desa Poka dan Rumah Tiga ke kampung halaman di Kecamatan Baguala kota Ambon.
- Program Lingkungan, meliputi rehabilitasi hutan mangrove dan hutan rakyat serta pesisir pantai di Petuanan Kajely, Lilialy dan Tagalisa di Pulau Buru (Yayasan KEMALA).
- Program Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Fasilitator untuk pemberdayaan Masyarakat (Kerja sama PKPM BAPPENAS – JICA)

#### **b) Hasil Kegiatan.**

Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dengan lokasi pelaksanaannya langsung bersama masyarakat telah mampu mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di Salahutu, Pulau – pulau Lease dan Seram Bagian Barat serta masyarakat Pesisir di Pulau Buru. Selain itu Masyarakat miskin dan ekonomi lemah cukup tertolong dengan model pemberdayaan meskipun situasi diwaktu itu masih sangat rawan konflik antar masyarakat. Hasil yang dicapai tersebut merupakan upaya bersama antara Masyarakat dengan Pemerintah dan LSM(NGO) sebagai bentuk kerjasama dengan dukungan dana dari lembaga donor. Hasil nyata dari kegiatan tersebut dapat dilihat dengan telah kembalinya masyarakat Desa Waay ke tempat semula di Kecamatan Salahutu, demikian pula masyarakat Desa Loki, Siaputy dan Laala di Seram Bagian Barat (Sekarang Kabupaten SBB) yang sudah waktunya dibarengi dengan kegiatan pemberdayaan sehingga mereka semakin berdaya. Di sisi lain bahwa pada daerah atau wilayah yang pernah dilakukan kegiatan tersebut tidak ada lagi konflik yang muncul di hari berikutnya terkait dengan kekhawatiran masyarakat tentang isu separatis Republik Maluku Selatan (RMS). Juga pemilihan kepala desa yang demokratis dengan tidak menimbulkan konflik padahal biasanya selalu ada konflik disaat selesai pemilihan. Kegiatan-kegiatan ditingkat desa yang merupakan cikal bakal tumbuhnya demokrasi tersebut dapat berlangsung secara baik dengan mengembangkan nilai-nilai demokrasi pada kelompok sasaran di desa atau dalam masyarakat adat yang lebih dikenal dengan nama negeri.

Dengan dimediasi oleh YPPM maka kewang sebagai kelompok dalam tata pemerintahan adat untuk perlindungan hutan dan lingkungan dapat bertindak secara optimal untuk melindungi hutan (tanaman) umur panjang seperti cengkih, pala, kelapa dan lain – lain milik masyarakat komunitas Kristen yang berada pada komunitas Muslim seperti desa Tial kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang ditinggalkan karena mengungsi disaat konflik sedang berlangsung dapat diselamatkan. Komunitas yang bertikai dapat dipertemukan untuk saling memahami kondisi yang sedang berlangsung dengan membicarakan tentang masalah dan kenyataan yang dihadapi bersama sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dimata hukum. Di desa(negeri) Tial ini pula YPPM melakukan kegiatan pendidikan Alternatif untuk anak-anak yang tidak dapat bersekolah atau putus sekolah karena konflik untuk tetap bersekolah sehingga menjadi awal berdirinya sebuah sekolah negeri lanjutan tingkat pertama (SLTP) setelah mendapat perhatian dari Pemerintah.

Dari pelaksanaan kegiatan di Pulau – pulau Lease maka YPPM mampu memediasi kepala – kepala desa (raja negeri) untuk dapat bertemu dan atas keinginan serta kehendak sendiri membentuk forum Latupati yang dikenal dengan Latupati Pulau Haruku. Latupati Pulau Haruku ini dapat berjalan maksimal terutama untuk mendorong kembalinya masyarakat Kariu yang mengungsi akibat konflik untuk kembali ke daerah asal di Kariu Pulau Haruku, juga dalam membicarakan kepentingan masyarakat adat di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Para kepala desa (Raja Negeri) untuk masyarakat adat di Maluku sangat berperan dalam setiap proses untuk kegiatan yang dilakukan YPPM di desa (negeri) mereka masing – masing.

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut maka yang masih sedang dilaksnakan adalah mediasi yang dilakukan oleh YPPM untuk Pemerintah dan Masyarakat adat Buru. Mediasi tersebut berkaitan dengan hak – hak tanah masyarakat adat di petuanan Kajely, Lilialy dan Tagalisa Kabupaten Buru.

### **c) Peran Lembaga, Mitra dan Rencana Kegiatan.**

#### **1. Peran Lembaga**

Dari setiap kegiatan maka lembaga YPPM tentunya mempunyai peran yang cukup besar bersama masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan melibatkan Pemerintahan Desa (Negeri), Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Peran – peran YPPM tentunya lebih dititikberatkan pada advokasi dan mediasi sebagai metode dan model dalam pendekatan di masyarakat sehingga apa yang menjadi kendala dan permasalahan dalam masyarakat serta Pemerintah dari segi kebijakan dapat berjalan dengan baik. YPPM juga dapat mengorganisir dan mendampingi masyarakat yang bertumpu pada kemampuan dan kearifan lokal sebagai bentuk pemberdayaan. Melakukan pelatihan – pelatihan di tingkat masyarakat untuk HAM dan Gender, Hak – hak Anak dan pendidikan serta resolusi konflik.

## 2. Keterlibatan Mitra

Sesuai Visi dan Misi dari YPPM maka keterlibatan mitra adalah sesuatu yang mutlak dan itu merupakan langkah strategis dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Mitra yang terlibat dalam suatu kegiatan atau sama – sama memperjuangkan kepentingan masyarakat menuju pada suatu perubahan selalu dilakukan secara kelembagaan dan juga individu. Demikian pula kemitraan yang dibangun dengan Pemerintah yang dimulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan Kabupaten, dapat dilibatkan sebagai mitra yang mendorong proses di masyarakat sesuai tugas dan fungsi Pemerintah dalam pembangunan.

## 3. Rencana kegiatan

Kegiatan – kegiatan selanjutnya akan sangat membantu masyarakat Maluku yang terpuruk akibat konflik. Kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari upaya mempertahankan situasi dan kondisi yang semakin baik yaitu dengan menumbuhkan benih – benih kedamaian dari dalam masyarakat. Kegiatan itu meliputi:

- ✚ PEMBERDAYAAN ekonomi, yaitu mendorong masyarakat untuk secara maksimal berusaha atau bekerja lebih giat dalam memenuhi kebutuhan keluarga dari berbagai sektor seperti bertani, nelayan dan berdagang.
- ✚ Pendidikan resolusi konflik, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam komunitas masing – masing tentang perbedaan seperti berbeda dalam beragama, etnis, politik dan lain – lainnya adalah bukan untuk dijadikan alasan bertikai. Berbeda adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi dengan arif dan bijak untuk masyarakat yang plural.

## 6. Monitoring

---

YPPM juga menjalankan sistem monitoring dan dimulai dari proses perencanaan maupun sistem pembudgetan dengan selalu mengadakan evaluasi pada proses jalannya suatu program hingga program dimaksud berakhir. Monitoring dan evaluasi selain dilakukan secara internal juga dilakukan oleh pihak eksternal yaitu pihak donor terkait dengan penggunaan dana kegiatan. Lembaga donor dapat menunjuk pihak ketiga untuk dapat mengevaluasi dan memonitoring penggunaan dana yang telah diberikan sebagai suatu bentuk kerja sama dalam menyelesaikan kegiatan dimaksud.

## YAYASAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( Y P P M )



**Abdulgani Fabanjo**  
Direktur

## Daftar Pengalaman LSM.

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Tugas dan Tanggungjawab	Pemberi Tugas Penggunaan Jasa		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
					Nama	Alamat Telpon	No / tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pendidikan Alternatif Kelas Jauh .	Pendidikan.	Tial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan sekolah alternatif yang aman dan nyaman di perbatasan dua daerah yang sedang berkonflik</li> <li>Mengembalikan anak-anak dan guru dari kedua daerah yang sedang berkonflik ke sekolah tersebut sehingga mereka bisa melaksanakan proses belajar mengajar dan bersosialisasi seperti sebelum konflik</li> <li>Memberikan materi pembelajaran yang bisa mengalihkan/ menghapus traumatik akibat konflik</li> </ul>	Emil Salim (CRP)	PKM/CRP. Tebet Barat Dalam I no.10 Jkt	KP. 3407 Agust, 2000	199,365,000	Okt, 2001	
2.	Maluku post conflict assessment towards a new peace Maluku society	Assesment & training & reconciliation.	Salahutu & Poka Rumah tiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi pertemuan antara masyarakat yang berkonflik</li> <li>Memberikan penilaian terhadap keinginan masyarakat untuk kembali ke daerah asal</li> <li>Memberikan pendampingan dalam proses pengembalian pengungsi akibat konflik ke daerah asal</li> </ul>	Laurie Pierce (USAID)	OCPR-DAI, Menara Duta jln Rasuna Said Kav B9. 0215269750	DAIJ0706 02/18/2003	130,057,000	05/16/2003	

3.	Normalization of Poka and Rumah Tiga Area in Ambon	Reconciliation	Poka & Rumah tiga	Membangun rasa kebersamaan dalam masyarakat sebagai korban konflik dan menghentikan tindak kekerasan untuk menciptakan perdamaian.	Ignacio Sainz Terrones (USAID)	OCPR-DAI, Menara Duta jln Rasuna Said Kav B9. 0215269750	DAIJ0863 01/05/2004	171,585,000	05/05/2004	
4.	Perlindungan Hutan Mangrove melalui Pemberdayaan dan Peningkatan Pendapatan Nelayan.	Pemberdayaan	Desa Jikumerasa Kabupaten Buru	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Menanam kembali (reboisasi) tanaman bakau</li> <li>•Menciptakan lapangan kerja bagi nelayan sehingga diharapkan mereka tidak merusak hutan mangrove</li> </ul>	Dadang Trisasongko (Yay. KEMALA)	Ratu Plaza Lt 17-18 Jln Sudirman Jakarta 0217209596	YK 046 / 28 Januari 2003	134,150,000	31/12/2003	
5.	Layanan Pendidikan Alternatif Maluku (PAM)	Pendidikan Alternatif	Waiheru & Nania	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Menciptakan sekolah alternatif yang aman dan nyaman di perbatasan dua daerah yang sedang berkonflik</li> <li>•Mengembalikan anak-anak dan guru dari kedua daerah yang sedang berkonflik ke sekolah tersebut sehingga mereka bisa melaksanakan proses belajar mengajar dan bersosialisasi seperti sebelum konflik</li> <li>•Memberikan materi pembelajaran yang bisa mengalihkan / mengurangi trauma akibat konflik</li> </ul>	PCBV. Rentany, Pr (SEKMA)	Jln. Raya Patimura Ambon	05/KK/SEKMA-PAM/2000 9 Okt. 2000	118,000,000	Des.2000	
6.	Seminar Sehari Revitalisasi Adat	Seminar	Kecamatan Buru Utara	Membangun kesadaran tentang pentingnya Budaya lokal dalam relasi masyarakat.	Dadang Trisasongko (Yay. KEMALA)	Ratu Plaza Lt 17-18 Jln Sudirman Jakarta 0217209596	YK/TW 054 07 Maret 2005	32,755,000	28/03/2005	



7.	Lokakarya Menuju Pembangunan Kembali Institusi Adat SosEk Masy Adat Maluku	Pelatihan / Seminar	Ambon	Memperkuat sistem pembangunan pada masing – masing wilayah sesuai dengan budaya lokal yang lebih mudah diterima oleh masyarakat	Dadang Trisasongko (Yay. KEMALA)	Ratu Plaza Lt 17-18 Jln Sudirman Jakarta 0217209596	YK/TW 046 25Oktober 2004	42,595,000	16/11/2004	
8.	Perencanaan Partisipatif Masyarakat	Pelatihan / Seminar	Desa Jikumerasa Kab. Buru.	Mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam membangun wilayahnya.	Dadang Trisasongko (Yay. KEMALA)	Ratu Plaza Lt 17-18 Jln Sudirman Jakarta 0217209596	YK/TW 045 10Oktober 2004	26,203,000	20/10/2004	
9.	Penguatan Kapasitas dan Pendampingan terhadap Pengungsi (LCB)	Pemberdayaan	Ternate Maluku Utara	Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang hak-hak sebagai korban pengungsi dan upaya penghentian kekerasan antar komunitas.	Lisanne Baumholz (ICMC)	Jl. Wijaya VI/14 Jakarta	15/05/2001	40,000,000	30/9/2001	
10	Pemberdayaan & Pengembalian Masyarakat Desa Tial dan Sekitarnya.	Pemberdayaan / Rekonsiliasi	Desa Tial Kec, Salahutu	Menciptakan rekonsiliasi diantara komunitas yang bertikai dengan memberdayakan potensi lokal pada kedua komunitas tersebut.	Lisanne Baumholz (ICMC)	Jl. Wijaya VI/14 Jakarta	01/12/2000	130,000,000	27/02/2001	
11	Inform Decision Making (IDM)	Pemberdayaan / Rekonsiliasi	Piru & sekitarnya (Lokki)	Menginformasikan tentang keinginan dan harapan diantara komunitas untuk rekonsiliasi.	Randall Garisson (ICMC)	Jln Pantai Mutiara 53 A Ambon	21/2/2002	37.045.000	25/4/2002	
12	Adressing Barries to Return (ABR)	Pemberdayaan / Rekonsiliasi	Piru & sekitarnya (Lokki)	Melakukan kunjungan dan pertemuan antara komunitas dari masyarakat yang mengungsi dengan yang tidak mengungsi sehingga pengungsi dapat kembali ke tempat semula.	Carmen S Lowry (ICMC)	Jln Pantai Mutiara 53 A Ambon	05/08/2002	56,693,000	31/10/2002	
13	Pengembangan Wirausaha Nelayan Kecil	Pemberdayaan	Kepulauan Lease	Pemberian bantuan peralatan nelayan sehingga menjadi fokus dalam bekerja dan tidak	Sven L	Jl. Dr.Kayadoe 311816	10/PK/CF-YH/IV/2002 Sept, 2002	73,135,200	Pebr, 2003	

				melibatkan diri dalam konflik antar komunitas.						
14	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Perlindungan Hutan Mangrove.	Pemberdayaan	Desa Jikumerasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanam kembali (reboisasi) tanaman bakau di Desa Jikumerasa.</li> <li>• Menciptakan lapangan kerja bagi nelayan sehingga diharapkan mereka tidak merusak hutan mangrove</li> </ul>	Swadaya (Mandiri)		2004			
15	Advokasi Hak-hak Masyarakat Adat	Pemberdayaan Masyarakat Adat	Lilialy, Kec. Namlea	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan bantuan hukum berkenaan dengan masalah-masalah adat</li> <li>• Mengembalikan hak-hak masyarakat adat</li> <li>• Memberikan pemahaman pentingnya hak-hak masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat</li> </ul>	Swadaya (Mandiri)		2004			
16	Advokasi	Pelatihan CBO	Namlea	Melakukan Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kelompok – kelompok masyarakat.	Swadaya (Mandiri)		2007			
17	Improving access to basic education and supporting the prevention of child labour	Education	Kab. SBB & SBT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi anak putus sekolah untuk dikembalikan ke sekolah</li> <li>• Memfasilitasi kegiatan untuk SMP Satap, SMP reguler dan PKBM dalam rangka pencegahan anak putus sekolah dan penghapusan pekerja anak</li> </ul>	ILO EAST Maluku		2008	US\$ 132,781		

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan PKM</li> <li>• Memobilisasi aksi stop pekerja anak pada hari Internasional Menentang Pekerja Anak</li> <li>• Membentuk local education forum di kabupaten SBB dan SBT</li> </ul>						
18	Improving access to basic education and supporting the prevention and elimination of child labor in Ambon municipality, Maluku Province 2010.	Education	Kota Ambon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi anak putus sekolah untuk dikembalikan ke sekolah</li> </ul>	ILO EAST Maluku		2010			
19	Supporting Sustainable Peace Through Economic Empowering and Conflict Mitigation in Three Big Market in Ambon	Pemberdayaan & Resolusi Konflik	3 Pasar Kota Ambon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas pedagang tentang management berdagang</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas masyarakat pasar tentang konflik dan resolusinya.</li> </ol>	USAID - SERASI		00198/2010/M012/SO2 (12 Juli 2010)	US\$ 95,699.66	11 Januari 2011	
20	Conflict Prevention In The Market Through Empowering Market Informal Leader	Resolusi Konflik	Pemimpin lokal (Pemuda) pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas pemuda tentang konflik dan resolusi.</li> <li>• Mencegah premanisme dfi pasar</li> </ul>	USAID - SERASI		001227/2010/MO17/SO2 (20 Sept 2010)	US\$ 57.836	31 Desember 2010	

21	Konservasi partisipatif ekosistem pesisir berbasis peningkatan kesejahteraan lestari	Pemberdayaan Masyarakat	Dusun Tanjung Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merestorasi partisipatif kawasan mangrove.</li> <li>• Recovery terumbu karang.</li> <li>• Melakukan pelatihan pengolahan prodak ikan dan sagu.</li> </ul>	GEF Small Grants Programme		2013	US\$ 20.000	16 Januari 2014	
22	Program Smallholder Livelihood Development in Eastrem Indonesia (SOLID)	Pemberdayaan Petani Kecil	Lima Kabupaten (Buru, Bursel, Malteng, SBB dan SBT) 104 Desa Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan tenaga personil untuk ditempatkan pada 5 lokasi pekerjaan.</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam melaksanakan kegiatan lapangan serta melaporkan dan mengevaluasi kemajuan kegiatan.</li> <li>• Melakukan pendampingan kepada kelompok mandiri yang dibentuk di desa.</li> </ul>	Badan Ketahanan Pangan Propinsi Maluku	Jalan Pengerangan Pantai Waihaong No.1 Ambon	027/254/T P/BKP/VII /2013 3 Juli 2014	Rp. 5.105.800.000		